

LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA JAMBI



TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan HidayahNYA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) Kota Jambi dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2023, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud tanggung jawab atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sepanjang tahun 2023.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2023 ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi untuk tahun mendatang dengan lebih baik lagi. Namun demikian kami menyadari bahwa penyusunan ini jauh dari suatu kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif kami harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA JAMBI



DRS. RADEN JUFRI. ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19671125 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA	I
PENGANTAR	
DAFTAR ISI	li
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.3.1. Maksud	9
	1.3.2. Tujuan	9
	1.4. Gambaran Umum Organisasi	10
	1.4.1. Organisasi	10
	1.4.2. Sumber Daya Manusia	12
	1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi	15
	1.4.4. Sarana dan Prasarana	18
	1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	21
	2.1. Rencana Strategis	21
	2.1.1. Visi dan Misi	21
	2.1.2. Tujuan	23
	2.1.3. Sasaran	23
	2.1.4. Strategi	24
	2.2. Perjanjian Kerja	27
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	35
	3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	35
	3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	35
	3.3. Pengukuran Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2022	47
	3.3.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	47
	3.3.2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian	

	Kinerja Tahun ini dengan Tahun Yang lalu dan beberapa Tahun terakhir.....	48
	3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target akhir tahun) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi....	48
	3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan	48
	3.3.5. Analisis atas efisiensi sumber daya	49
	3.3.6. Analisis Program dan Kegiatan	50
	3.4. Akuntabilitas Keuangan	55
	3.4.1. Realisasi Anggaran	55
BAB IV	PENUTUP	58
	4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	58
	4.2. Prestasi SKPD	59
	4.3. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	58

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diakhir masa RPJMDP periode tahun 2018 – 2023 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis perubahan tahun 2018 – 2023 dan rencana kinerja tahun 2023 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2023 yang diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pembei mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi;
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan

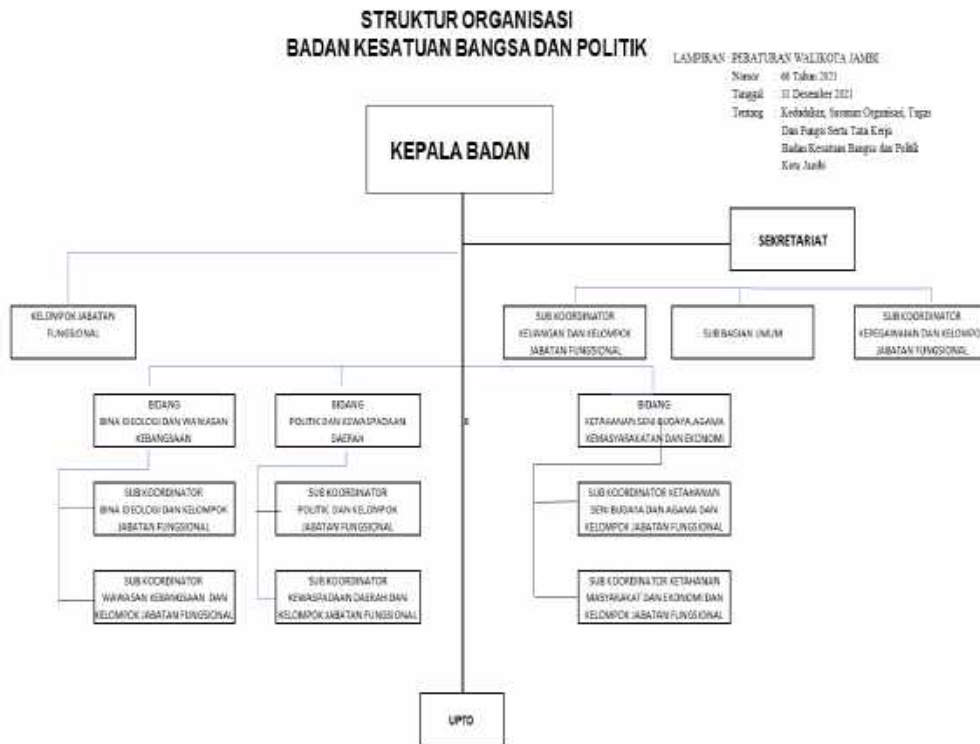
Bangsa dan Politik Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



1.2 Tugas Dan Fungsi

A. Kepala Badan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
- c. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Tugas Pokok : membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kerja dengan bidang-bidang;
- c. pembinaan administrasi dibidang kesekretariatan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
- e. penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), perjanjian kinerja (PK), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);

- f. pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang-bidang;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

C. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tugas Pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. pelaksanaan koordinasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah

Tugas Pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan politik dan kewaspadaan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang politik dan kewaspadaan daerah;

- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknisbidangpolitik dan kewaspadaan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahanbidang politik dan kewaspadaan daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi bidang politik dan kewaspadaan daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

E. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi

Tugas Pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan ketahanan seni budaya, agama, masyarakat dan ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketahanan seni budaya, agama, masyarakat dan ekonomi;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknisbidangketahanan seni budaya, agama, masyarakat dan ekonomi;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan seni budaya, agama, masyarakat dan ekonomi;
- d. pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat;
- e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni budaya, agama, masyarakat dan ekonomi;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

F. Satuan Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

- c. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan.
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan peraturan walikota.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Kesatuan dan Politik Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembinaan terhadap Ormas guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan perkembangan politik;
4. Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda;
5. Isu-isu terorisme, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga;
6. Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya;
7. Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 08 dan 09 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pembangunan Rumah Ibadah;

8. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya gesekan yang menimbulkan konflik SARA;
9. Adanya potensi konflik sosial akibat perkembangan budaya, iptek dan teknologi;
10. Adanya keberadaan orang asing yang belum memenuhi ketentuan perundang undangan yang belum dilaporkan.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memiliki sumber daya manusia dalam jumlah, Pada Tahun 2023 terdapat 35 Pegawai yang terdiri dari 21 Orang PNS, dan 14 Orang Tenaga Kontrak. Berikut kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagaimana terlihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4.
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Badan Kesbangpol	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	1	4	0	4	0	0	9
3	Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah	0	3	0	1	0	0	4
4	Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan	0	2	0	0	0	0	2

	Ekonomi							
5	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	3	2	0	0	0	0	5
7	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	0	9	2	2	1	0	14
JUMLAH		5	20	2	7	1	0	35
%		14,3	57,1	5,7	20	5,7	0	100

Sumber : Sub bagian Kepegawaian Badan Kesbangpol Kota Jambi Tahun 2023

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.4 tingkat pendidikan pegawai Badan Kesbangpol yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 13 orang (57,1%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Badan Kesbangpol yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Kesbangpol secara umum. Jumlah pegawai Badan Kesbangpol yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 3 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut sebesar 14,3% dari seluruh pegawai Badan Kesbangpol, tentu ini dirasa kurang mengingat beban dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sebagai lembaga pemersatu bangsa kedepannya. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM bukanlah alasan bagi Badan Kesbangpol untuk dapat mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara optimal.

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Badan Kesbangpol Tahun 2023

AKUN	Jumlah Barang
TANAH	
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-
Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	1 bidang
PERALATAN DAN MESIN	
Kendaraan Dinas Roda empat	6 unit
Kendaraan Dinas Roda dua	11 unit
Filling Kabinet	18 unit
AC	13 unit
PC	8 unit
Laptop	16 unit
Printer	20 unit
Meja kerja pejabat	14 unit
Kursi kerja pejabat	14 unit
Meja Rapat	1 set
Kursi Rapat	60 unit
Kursi kerja staf	20 unit
Meja kerja staf	22 unit
Lemari arsip	12 unit
Peralatan studio visual (handycam, TV)	1 unit
Peralatan studio lainnya (kamera)	1 unit
Sound system	2 unit
Sound Portable	1 unit
Infocus	1 unit
Alat komunikasi telephone	1 unit
GEDUNG DAN BANGUNAN	
Bangunan gedung kantor	1 unit
Musholla	1 unit
Aula	1 unit
JARINGAN DAN IRIGASI	
Jaringan Fiber Optik	1 paket
Instalasi telepon	1 paket
Jaringan Internet (Wifi)	1 paket
Jaringan PDAM	1 paket

Sumber : Pengurus Barang Milik Daerah Badan Kesbangpol tahun 2023

Lokasi Badan Kesbangpol Kota Jambi berada tidak jauh dari perkantoran pemerintah lainnya, meskipun terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Jambi di Jl. Basuki Rahmat Kota Baru Kota

Jambi. Permasalahan pada sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia kurang memadai, seperti kendaraan dinas untuk pejabat belum terpenuhi dan beberapa diantaranya kondisinya kurang baik, peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) banyak yang dalam kondisi kurang baik, dan biaya untuk pemeliharaan kurang memadai. Permasalahan pada asset, sarana dan prasarana di Badan Kesbangpol Kota Jambi berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, status kepemilikan gedung yang masih terkendala dari sisi legalitas menyebabkan pembangunan kantor tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, sekalipun pada Tahun Anggaran beberapa tahun yang lalu telah dilakukan rehabilitasi gedung kantor, tetapi baru dilakukan perbaikan yang sifatnya partial. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset yaitu tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang yang rusak berat atau yang sudah tidak bisa digunakan lagi.

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.733.274.959.

Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023. Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMMD Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMMD Pemerintah Kota Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi nomor : 43.2 TAHUN 2022 Tentang Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna :

Pusat Perdagangan dan Jasa :	Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;
Berbasis Masyarakat :	Community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan serta bersedia untuk menerima perubahan;
Berakhlak :	Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
Berbudaya :	Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;

Pelayanan Prima :	Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah
-------------------	--

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Berangkat dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tahun 2018-2023 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan Pemerintah Umum di bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat”.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2018-2023 adalah “Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan Aman”.

2.1.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2018– 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus Cara Pengukur an Indikator Sasaran	TARGET SASARAN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila		-	20	40	60	80	100
Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat		-	20	40	60	80	100

2.1.1.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Strategi, Program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
<p>Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>
		<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>
		<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>
		<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>
		<p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p>
		<p>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p>
		<p>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p>
		<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</p>
		<p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>
		<p>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p>
		<p>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p>
		<p>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</p>
		<p>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>
		<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>
		<p>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p>
		<p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>
		<p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p>
		<p>Fasilitasi Kunjungan Tamu</p>
		<p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
		<p>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p>
		<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>
		<p>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>
		<p>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
		<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
		<p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>
		<p>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>
		<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</p>

		Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi

		<p>Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>
<p>Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan</p>	<p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</p>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>
	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Instansi mengacu pada Renstra, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila	Persen	100
Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	Persen	100

Sasaran tersebut diwujudkan melalui program, dimana program merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan kebijaksanaan strategik. Program merupakan. Program strategik merupakan tindakan-

tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan kebijaksanaan. Satu program dapat mempunyai keterkaitan dengan salah satu sasaran atau lebih, namun sebaliknya dapat saja sasaran hanya dipenuhi melalui beberapa program.

Atas dasar faktor tersebut, maka program strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dan Pemantauan Situasi Politik.
3. Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial budaya.
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Program Penguatan Ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan, Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air	Persen	100
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dan Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Kota Jambi	Persen	100
Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Mewujudkan Kondisi Daerah Yang Kondusif	Persen	100
Program pembinaan dan pengembangan	Persentase Peningkatan	Persen	100

ketahanan ekonomi, sosial budaya	Fasilitasi Pembinaan Ummat Beragama dan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Daerah dan Potensi Konflik di Kota Jambi	Persen	100

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.11.069.255.475,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 11.034.476.450,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 34.779.025,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp. 23.733.274.959,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 23.651.879.244 dan belanja modal sebesar Rp. 81.395.715,-

Tabel 2.3
Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi
APBD Perubahan Tahun 2023

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasional	23.651.879.244	100%
Belanja Modal	81.395.715	100%
Jumlah	23.733.274.959	100%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.939.324.423	16,6%
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.614.075.840	6,80%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	202.352.800	0,9%
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.086.095.620	8,8%
2	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	15.234.846.276	64,2%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 6 (enam) program yang terdiri dari 12 kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut :

Tabel 2.7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	70	3.939.324.423

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B	86.121.918
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	68.500.083
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	17.621.835
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.863.410.845
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	2.583.142.645
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	270.585.200
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	3.437.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	6.246.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	33,33	75.750.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 paket	45.750.000
Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendaftaran dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	6.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	9.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	15.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	395.975.345
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik	4 paket	7.611.266
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	69.999.767
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	21.099.802
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	28.915.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	258.349.310
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	81.395.715
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	20.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	61.395.715
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	100%	178.374.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	113.374.800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 laporan	65.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258.295.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 unit	194.170.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atay lapangan yang dipelihara dan dbayarkan pajaknya	3 unit	29.625.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	13 unit	8.214.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 uit	24.286.800
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit	2.000.000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air	100%	1.614.075.840
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan Kota Jambi	100%	1.614.075.840
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	54 orang	1.323.034.500
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	264.911.400

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	26.129.940
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kota Jambi	100%	15.234.846.276
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatkan motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	15.234.846.276
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 orang	15.221.324.976
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 laporan	13.521.300
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif	100%	656.580.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan peran serta ormas yang terdaftar dalam pembangunan di Kota Jambi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	656.580.000

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 orang	621.370.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 laporan	35.210.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan fasilitas pembinaan umat beragama dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba	100%	202.352.800
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan pemberian Izin Rekomendasi IMB Rumah Ibadah di Kota Jambi serta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	202.352.800
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 orang	113.752.800
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 laporan	88.600.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi	100%	2.086.095.620
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya pencegahan dini potensi konflik di Kota Jambi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	2.086.095.620
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	150 orang	108.588.700

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	14.169.920
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan forum Koordinasi pimpinan daerah/kabupaten/kota	4 kali	1.963.337.000

Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tahun 2023 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.a
Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PEGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila	Jumlah forum yang dibina dibagi dengan jumlah forum yang terdaftar di kali seratus persen	100%	100%	100%
Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	Jumlah orkemas dan parpol yang terdaftar dibagi dengan jumlah orkemas dan parpol yang aktif	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023, indikator Sasaran memiliki realisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dari target sebesar 100% Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori (Sangat Baik) Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.1.1.b berikut.

Tabel 3.1.1.b
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	70	3.939.324.423	3.861.486.910	98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	B	86.121.918	Rp85.682.879	99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	68.500.083	68.398.750	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	17.621.835	17.284.129	98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.863.410.845	2.810.690.657	98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	2.583.142.645	2542644457	98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	270.585.200	260.280.200	96
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 dokumen	3.437.000	1.787.000	52
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	6.246.000	5.979.000	96

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	33,33	75.750.000	72.310.000	95
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45 paket	45.750.000	45.750.000	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	6.000.000	6.000.000	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	9.000.000	9.000.000	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 orang	15.000.000	11.560.000	77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	395.975.345	385.221.368	97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen/instalasi telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik	4 paket	7.611.266	7.606.000	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor	1 paket	69.999.767	69.959.084	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	1 paket	21.099.802	21.084.720	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	28.915.200	28.908.500	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	258.349.310	247.681.614	96
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	10.000.000	9.980.450	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	81.395.715	80.600.000	99

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	20.000.000	20.000.000	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	61.395.715	60.600.000	99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	178.374.800	172.004.256	96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	113.374.800	113.374.800	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 laporan	65.000.000	58.629.456	90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	258.295.800	254.977.750	99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 unit	194.170.000	191.850.850	99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atay lapangan yang dipelihara dan dbayarkan pajaknya	3 unit	29.625.000	29.456.900	99
Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	13 unit	8.214.000	8.120.000	99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 uit	24.286.800	23.550.000	97
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit	2.000.000	2.000.000	100
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan	100%	1.614.075.840	1.527.124.100	95

	Karakter Kebangsaan yang cinta tanah air				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya penguatan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan Kota Jambi	100%	1.614.075.840	1.527.124.100	95
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	54 orang	1.323.034.500	1.301.569.500	98
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	264.911.400	205.004.600	77
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	26.129.940	20.550.000	79
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	Persentase peningkatan peran partai politik dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu	100%	15.234.846.276	15.229.713.616	100

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	di Kota Jambi				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatkan motivasi, partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu, dan Indeks Demokrasi di Kota Jambi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	15.234.846.276	15.229.713.616	100
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 orang	15.221.324.976	15.216.303.116	100
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 laporan	13.521.300	13.410.500	99
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan	100%	656.580.000	651.490.000	99

	an dalam mewujudkan kondisi daerah yang kondusif				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan peran serta ormas yang terdaftar dalam pembangunan di Kota Jambi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	656.580.000	651.490.000	99
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 orang	621.370.000	616.430.000	99
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 laporan	35.210.000	35.060.000	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan fasilitas pembinaan umat beragama dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba	100%	202.352.800	195.730.788	97
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan pemberian Izin Rekomendasi IMB Rumah Ibadah di Kota Jambi serta sosialisasi pencegahan penyalahguna	100%	202.352.800	195.730.788	97

	an Narkoba dan monitoring, evaluasi dan pelaporan				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaa n Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghaya Kepercayaan di Daerah	250 orang	113.752.800	107.974.800	95
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaa n Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 laporan	88.600.000	87.755.988	99
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dan potensi konflik di Kota Jambi	100%	2.086.095.620	1.959.676.700	94
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya pencegahan dini potensi konflik di Kota Jambi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	2.086.095.620	1.959.676.700	94
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen,	150 orang	108.588.700	105.301.700	97

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan	14.169.920	12.230.000	86
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan forum Koordinasi pimpinan daerah/kabupaten/kota	4 kali	1.963.337.000	1.842.145.000	94
Jumlah			23.733.274.959	23.425.222.114	99

Dari tabel terlihat bahwa Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan capaian 100%. Hal ini tentunya tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.1.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

INDIKATOR SASARAN	2022			2023			PERSENTASE REALISASI 2023 TERHADAP REALISASI 2022
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila	80%	80%	100%	100%	100%	100%	1,25%
Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	80%	80%	100%	100%	100%	100%	1,25%

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 1,25%. Capaian kinerja tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran sebesar 80% dan tahun 2023 ditingkatkan lagi pencapaiannya sebesar 20% sehingga menjadi 100%. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun sasaran telah tercapai 100%.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1.3

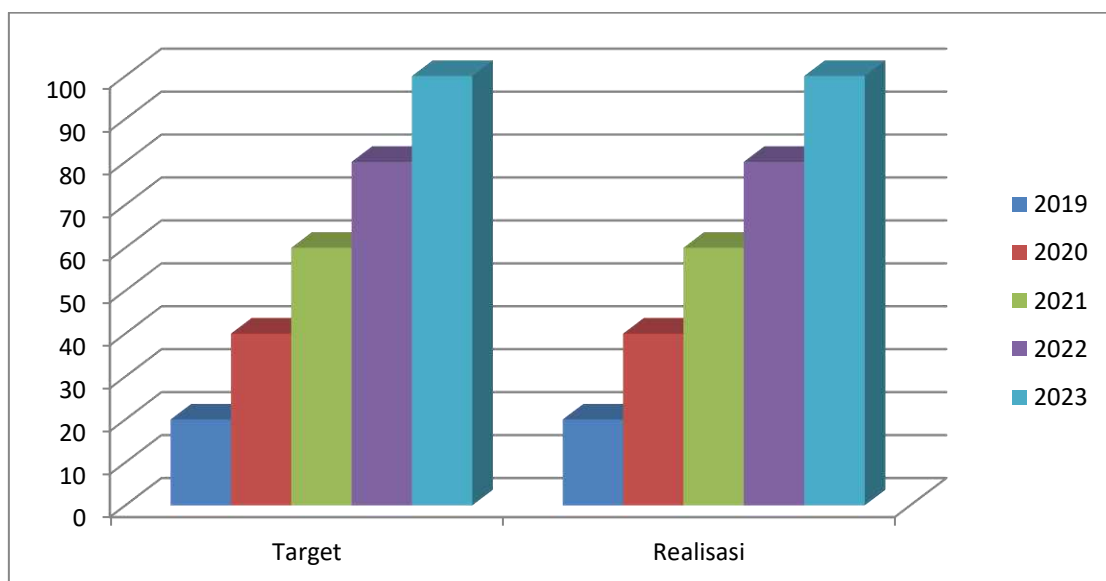
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

INDIKATOR SASARAN	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila	-	-	20	20	40	40	60	60	80	80	100	100
Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	-	-	20	20	40	40	60	60	80	80	100	100

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2023 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah tercapai. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target.

Gambar 3.1.3

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target



3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi :

1. Pelaksanaan tugas belum sepenuhnya mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini diperlukan agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan secara turukur, terarah, dan tepat sasaran. Disamping itu tujuan dari SOP adalah agar setiap aparat mampu berperan lebih baik lagi dalam proses pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Jambi.
2. Kurangnya pemahaman akan wawasan kebangsaan, dalam era globalisasi sekarang ini telah mempengaruhi rasa nasionalisma dan kebangsaan generasi muda, seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan negaranya lambat laun semakin terkikis, dan berubah dengan generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa. Banyak dikalangan anak-anak muda yang sudah tidak lagi mengenal Pancasila sebagai dasar negara, semboyan Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Empat konsensus kebangsaan ini menjadi kunci utama tegaknya NKRI di masa yang akan datang. Kita harus terus menanamkan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda agar tidak kehilangan jati diri bangsanya dan membentengi diri dari arus derasnya budaya asing yang masuk ke Indonesia.

Faktor penunjang keberhasilan

Analisis Efisiensi dari sasaran strategis, terhadap sasaran kerjanya sudah sesuai target, dengan melakukan kegiatan pendidikan, sosialisasi dan pemantauan dan monitoring terhadap forum forum dan organisasi kemasyarakatan di Kota Jambi. Terkait dengan penggunaan sumberdaya manusia dan program kegiatan yang menunjang

keberhasilan adalah melalui diklat dan bimtek bagi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi maupun Pemerintah Provinsi Jambi.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi pada tahun 2023:

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN %	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait Ideologi Pancasila	100%	95,33%	4,67
2	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	100%	99,5%	0,5

Analisis Efisiensi dari sasaran strategis, terhadap sasaran kerjanya sudah sesuai target, dengan melakukan kegiatan pendidikan,

sosialisasi dan pemantauan dan monitoring terhadap forum forum dan organisasi kemasyarakatan di Kota Jambi. Terkait dengan penggunaan sumberdaya manusia dan program kegiatan yang menunjang keberhasilan adalah melalui diklat dan bimtek bagi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi maupun Pemerintah Provinsi Jambi.

:

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi Pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja Instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LkjiP atau dikenal Lakip menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara publik sendiri, LKjiP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik
2. LkjiP bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi juga menjadi punya makna strategis sebagai bagian dari penterjemahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dalam masa masa awal implementasi sebagai organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, LkjiP juga menjadi bagian pertanggungjawaban tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi baik terhadap Walikota Jambi maupun kepada seluruh masyarakat.
3. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi 2018-2023 sebagaimana telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dapat dinyatakan berhasil.

4.2 INOVASI DAN PRESTASI

Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi tidak mengikuti Lomba Inovasi, karena masih menyempurnakan Inovasi tahun-tahun sebelumnya yaitu Aplikasi si OMAS. Dan belum berhasil mengukir Prestasi di tahun 2023.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi di masa mendatang adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui kegiatan bimtek, kursus, dan diklat bagi aparatur Badan Kesbangpol Kota Jambi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran Badan Kesbangpol Kota Jambi.
3. Membangun kerjasama dan jaringan dengan Instansi vertikal, horizontal, dan organisasi kemasyarakatan di Kota Jambi.
4. Mengembangkan data dan informasi dengan basis Teknologi Informatika.